

BELENGGU KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM RANAH POLITIK

Kholid Zulfa

*Staf Pengajar pada
Fakultas Syari'iah
IAIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta dan
Aktifis di Lembaga
Studi Agama dan
Kekerasan L-SAK
Yogyakarta*

Abstract

The willingness to rest women and men in a parallel position within various aspects of life is gaining its prominence, especially in terms of women's participation in politics. Within the discourse of leadership, none of the theory claims that certain sex –male or female—has more authority or privilege over another. Both sexes have the same rights to be leaders depending on who has better quality to hold that position. This article is an attempt to explain the discourse on the leadership of women within the political realm. The stigma given to women that a good woman is the ones who could perform their duties as a wife and a mother, coupled with the assumption that politics is dirty and full of intrigues, have weaken the opportunity of women to be actively involved in politics. For that reason, even though the number of women in Indonesia outweighs those of men, the representative of women in the parliament in every general election is only between 8 to 12 per cent.

A. Pendahuluan

Topik yang menarik akhir akhir ini adalah keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Sejak John Naisbit dan patricia Aburden mencetuskan ramalannya dalam megatrend 2000 tentang kepemimpinan perempuan menjelang tahun 2000an, dikotomi laki-laki versus perempuan dalam masyarakat semakin hari terasa semakin menguat terutama menyangkut hal-hal yang bersifat politis seperti urusan kepemimpinan, baik kepemimpinan dalam rumah tangga, kepemimpinan dalam instansi, kepemimpinan dalam partai politik, kepemimpinan dalam organisasi sosial keagamaan, terlebih lagi kepemimpinan tertinggi pada pusat pemerintahan.

Perempuan, yang sering disebut juga putri atau wanita dan laki-laki atau pria adalah jenis makhluk dari bangsa manusia yang secara biologis dan fisiologis dijadikan Tuhan agak berbeda. Perbedaan itu tentu mengandung kepentingan dan hikmah bagi

manusia. Dengan perbedaan itu mereka perempuan dan laki-laki dapat saling memahami, saling sayang-menyayangi, saling menghargai dan bekerja sama.

Pada dasarnya hanya ada dua pilihan bila kita hidup dalam suatu masyarakat, yakni sebagai pemimpin atau yang dipimpin. Sebagai yang dipimpin harus memiliki sikap loyal, patuh dan ta'at pada atasan sebagai pemimpin dan rela berkorban serta bekerja keras untuk mendukung pencapaian tujuan bersama. Sedang sebagai pemimpin diwajibkan memiliki pengetahuan dan kemampuan (kapabilitas) untuk memimpin serta dapat diterima (akseptabilitas) oleh yang dipimpin. Kemampuan memimpin harus diwujudkan dengan mengorbankan diri demi tujuan yang ingin dicapai, baik berkorban waktu, tenaga, pikiran dan materi, serta dapat diterima dalam arti dapat dipercaya masyarakatnya.

Kepemimpinan merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi prestasi organisasi atau masyarakat karena kepemimpinan merupakan aktifitas yang utama dengan mana tujuan bersama dapat dicapai. Pada umumnya kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi aktifitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Dari definisi ini tampak bahwa kepemimpinan adalah suatu proses (bukan orang).

Dalam kajian sosiologi, kepemimpinan dilihat dari segi posisi dan proses sosial, ia juga dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kepemimpinan formal (resmi) dan kepemimpinan informal (tak resmi). Kepemimpinan resmi adalah kepemimpinan yang tersimpul dalam suatu jabatan, sedangkan kepemimpinan informal adalah kepemimpinan karena adanya pengakuan masyarakat akan kemampuan (*capability*) seseorang untuk menjalankan kepemimpinan. Pada sifat yang pertama kepemimpinan harus berada di atas landasan-landasan atau aturan-aturan resmi, sehingga daya cakupnya terbatas. Sedangkan kepemimpinan informal ruang linkupnya tidak ada batasan yang pasti, karena didasarkan pada pengakuan dan kepercayaan masyarakat.¹ Pada tipe pertama kepemimpinan bersifat struktural, yaitu bahwa kepemimpinan didasarkan pada struktur organisasi secara resmi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sementara pada tipe kedua kepemimpinan bersifat fungsional, di mana kepemimpinan dilihat dari segi fungsi-fungsi sosial dalam suatu interaksi sosial.

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : CV Rajawali, 1994), 319.

B. Lahirnya Pemimpin

Semua ahli filsafat dan biologi seia-sekata bahwa tali seks merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia. Dan untuk kesempurnaan penunaian fungsi dan tugas kodrat alam ini, tubuh serta jiwa laki-laki dan perempuan disempurnakan oleh Tuhan Maha Pencipta. Demi kesempurnaan tercapainya tujuan kodrat alam ini, yaitu tujuan mengadakan turunan dan memelihara turunan itu, alam memberikan fungsi dan alat-alat “ke-laki-lakian” kepada laki-laki dan alat-alat “keperempuanan” kepada perempuan. Tetapi seharusnya perbedaan-perbedaan ini tidak membawa perbedaan di dalam peri kehidupan mereka sebagai makhluk sosial.

Dalam diskursus teori kepemimpinan, terdapat tiga teori yang menonjol mengenai timbulnya seorang pemimpin:²

1. Teori Genetis

Intisari dari ajaran teori ini tersimpul dalam sebutan bahwa : *leader are born and not made* (pemimpin adalah dilahirkan bukan dibuat). Teori ini menentang pendapat bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia merupakan keturunan pemimpin atau telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Dalam keadaan bagaimanapun seseorang ditempatkan, karena ia telah ditakdirkan, suatu saat ia akan muncul menjadi pemimpin.

2. Teori Sosial

Inti dari ajaran teori ini adalah “ *leaders are made and not born* “ bahwa setiap orang dapat menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup, pada hakikatnya setiap orang dapat menjadi pemimpin meskipun bukan merupakan keturunan dari seorang pemimpin, baik dalam kepemimpinan formal maupun informal dan dalam skala luas (negara, pemerintahan) maupun dalam skala kecil dan menengah (desa, kantor, tempat tinggal dan keluarga)

3. Teori Ekologis

Teori ini mengandaikan bahwa seseorang akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia sejak lahirnya telah memiliki bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang telah dimiliki itu.

Pada perkembangan lebih lanjut ada pendapat yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya bakat dan lingkungan saja, tetapi ada faktor lain

²Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Kepemimpinan Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta : Bina Aksara, 1988), 18.

yaitu kegiatan pribadi (auto-aktivitas). Artinya bakat memang memiliki peranan, demikian halnya dengan lingkungan (pendidikan dan pengalaman) tetapi tanpa adanya kemauan dan usaha sendiri, kedua faktor tersebut sulit berkembang.

Hal inilah yang mendorong munculnya teori keempat yaitu teori tiga dimensi atau teori kontingensi. Disebut teori tiga dimensi karena ada tiga faktor yang turut berperan dalam proses perkembangan seseorang menjadi pemimpin atau tidak, Yaitu : (1) bakat kepemimpinan yang dimiliki; (2) pendidikan, pengalaman dan latihan kepemimpinan yang dimilikinya; (3) kegiatan sendiri untuk mengembangkan bakat kepemimpinan tersebut. Teori ini disebut juga dengan teori kontingensi karena dapat tidaknya seseorang menjadi pemimpin merupakan serba kemungkinan, bukan suatu yang pasti. Seseorang bisa atau mungkin menjadi pemimpin jika bakat, lingkungan, kesempatan, dan kepribadiannya sendiri (motivasi, minat) memungkinkan.

Menurut Ordway Tead timbulnya seorang pemimpin itu karena ;

- a. Membentuk diri- sendiri (*self constituted leader, self mademan, born leader*)
- b. Dipilih oleh golongan. Seseorang menjadi pemimpin karena jasa-jasanya, karena kecakapannya, keberaniannya termasuk mengambil resiko dan sebagainya dalam sebuah organisasi ataupun masyarakat.
- c. Ditunjuk dari atas, Seseorang menjadi pemimpin karena dipercaya dan disetujui pihak atasan.

Jika ditinjau secara sosiologis, peranan sebagai pemimpin dapat diperoleh seseorang :

- a. Karena prestasi (*achieved*). Prestasi tentu bermacam-macam, antara lain (1) banyak pengalaman memimpin organisasi; (2) Keahlian di suatu bidang yang menonjol, hingga cocok jika dipilih untuk memimpin pekerjaan serupa; (3) jasa yang diberikan kepada lembaga/ organisasi/kelompok/ masyarakat.
- b. Karena tradisi dan sebagainya (*ascribe*). Ini juga bisa bermacam-macam bentuknya, misalnya : (1) pewarisan menurut keturunan; (2) dibebankan karena senioritas; (3) karena berkaitan dengan posisi-posisi atau pertalian lain.³

C. Bias dalam Kepemimpinan Politik

Dari diskursus teori kepemimpinan di atas, baik teori *Genetis*, teori *sosial*, maupun dalam teori *Ekologis* tidak satupun teori yang mempersoalkan jenis kelamin atau seks tertentu sebagai pemilik dominan (*previllage*) untuk

³Imam Moedjiono, *Kepemimpinan dan Keorganisasian*, Yogyakarta : UII Press, 2002), 18.

menjadi seorang pemimpin. Terlebih dalam hal bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang harus dilatih dan diupayakan, bukan sesuatu yang melekat sejak lahir, ini berarti bahwa laki-laki maupun perempuan sesungguhnya sama-sama mempunyai hak kepemimpinan dalam kehidupan, tergantung siapa yang berhasil memperoleh kualitas itu.

Jika dikaitkan dengan teori tiga dimensi atau teori kontingensi yang mengandaikan bahwa: dapat tidaknya seseorang menjadi pemimpin merupakan proses gabungan dari tiga faktor yang terlibat yakni: bakat kepemimpinan yang dimiliki, pendidikan dan pengalaman, serta kesempatan mengembangkan diri, maka yang tersebut kedua dan terakhir inilah yang mengakibatkan peluang dan kesempatan perempuan terbatas dan terhambat untuk mengembangkan diri tumbuh menjadi pemimpin.

Selama beratus ratus tahun perempuan dianggap tidak mampu apa-apa dan ditempatkan dalam kekangan tembok keluarganya untuk melayani suami, hamil, melahirkan, dan mengasuh anak. Sementara kaum laki-laki telah mendominasi percaturan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu untuk mendapatkan hak persamaannya dengan kaum laki-laki, perempuan harus meyakinkan dengan kemampuannya yang nyata sebelum laki-laki mau menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada kaum perempuan. Kenyataan ini perlu diperhatikan dengan meningkatkan peran kepemimpinan perempuan dalam tingkat nasional, regional maupun lokal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia.

Sebagaimana manusia yang utuh, perundang-undangan di Indonesia tidak mempunyai jenis kelamin, sehingga apapun yang berlaku bagi laki-laki berlaku juga bagi perempuan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk menduduki jabatan dalam hukum dan pemerintah, lebih luas lagi dalam GBHN (1993) dijelaskan bahwa perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang sebagai mitra sejajar. Dengan demikian semestinya tidak ada hambatan bagi perempuan untuk terjun dalam bidang politik sebagai implementasi hak azasi manusia.

Dalam bidang pendidikan memperlihatkan angka yang mulai naik dalam jumlah peserta didik dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat universitas. Dalam dunia bisnis telah muncul beberapa nama wanita sebagai pengusaha yang berhasil. Kegiatan wanita dalam bidang politik ditandai dengan keberhasilan karimya menembus tingkat tertinggi dalam pemerintahan, parlemen maupun dalam partai dan organisasi, baik organisasi yang berorientasi pada pemerintah/ semi pemerintah maupun non pemerintah (LSM) dari tingkat yang besar sampai tingkat yang kecil.

Deretan nama-nama tokoh perempuan semakin hari agaknya memang semakin panjang yang dapat disebutkan, namun demikian deretan nama-nama tersebut masih jauh dari harapan kaum perempuan, terutama kepemimpinan perempuan di bidang politik agaknya belum memperoleh pengakuan yang diharapkan.

Hasil sensus tahun 2000 seperti sensus tahun 1990 mengungkapkan bahwa penduduk perempuan tetap sedikit lebih banyak dari pada laki-laki. Berdasarkan survei Biro pusat statistik tahun 2001 jumlah penduduk perempuan adalah sebesar 101.628.816 atau sekitar 51 %, tahun 1990 seluruh penduduk 179.321.641, yang terdiri dari perempuan 89.873.406 dan laki-laki 89.448.235. Jadi dari segi kuantitasnya kaum perempuan merupakan potensi sumber daya manusia yang sama besarnya dengan kaum pria, namun penerimaan masyarakat terhadap perempuan dan perannya, apalagi dalam ranah politik, hingga sekarang tampaknya masih simpang siur dan menimbulkan perdebatan yang cukup sengit. Bahkan di era Reformasi dan Globalisasi sekalipun, perempuan masih sering dicurigai dan cenderung dijadikan komoditas.

Keterlibatan perempuan dalam bidang pemerintahan, belum memperlihatkan jumlah yang menggembirakan, khususnya yang sudah menduduki jabatan tinggi. Menteri wanita hanya ada beberapa orang dan hanya menduduki bidang tertentu seperti masalah wanita dan masalah sosial. Keterlibatan perempuan dalam parlemen juga belum menunjukkan kuantitas dan kualitas yang cerah.

Di bidang politik, sejak pertama kali perempuan berpartisipasi langsung dalam pemilihan umum pada tahun 1955, dengan hasil anggota perempuan Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 17 orang yang berarti 0,7 % dari anggota seluruhnya 255 orang. Kemunduran perempuan dalam pentas politik nasional sangat terasa pada masa Orde Baru. Organisasi perempuan menjadi terbatas aksesnya pada persoalan-persoalan politik kecuali sebagai organisasi pendukung penguasa.

Selama ini perempuan yang duduk di DPR/MPR tidak sesuai dengan populasinya, dimana 51 persen dari jumlah penduduk Indonesia tahun 1971 mendapat 33 kursi, pada tahun 1992 naik menjadi 60 kursi, akan tetapi pada tahun 1997 jumlah tersebut menurun kembali menjadi 57 kursi. Jumlah wanita hanya mencapai 11% pada tahun pemilihan 1992, sedangkan tahun 1997 jumlah perempuan 12 %. Padahal potensi jumlah pemilih perempuan tahun 1992, sebanyak 55.074.722 orang, sementara pemilih laki-laki hanya 52.490.925 orang. Kepemimpinan perempuan diparlemen bertambah sedikit, dari 55 orang yang duduk di DPR, hanya 4 orang saja duduk sebagai pimpinan (ketua/atau wakil ketua komisi).

Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini dalam banyak hal perempuan masih sering di nomor duakan (setelah laki-laki) tak terkecuali pula dalam bidang politik. Ada yang berpendapat faktor internal perempuan itu sendiri seperti ketidak tertarikan mereka akan dunia politik yang menyebabkan tidak banyaknya perempuan yang terjun didalamnya. Namun demikian masih banyak faktor lain yang lebih dominan akan hal tersebut, meskipun pendapat tadi tidak sepenuhnya salah.

Perjuangan untuk mendapatkan akses pada persoalan dan kebijakan politik menghadapi pemilu 2004 kembali semarak melalui wacana kuota perempuan di parlemen, yang merupakan salah satu rekomendasi dari kongres perempuan sedunia tahun 1995 di Beijing.

Pada tahun 2000 secara resmi dideklarasikan Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Forum ini mencoba merespon rendahnya partisipasi politik perempuan yang diakibatkan oleh sistem negara yang patriarkhis, sementara jumlah penduduk perempuan di Indonesia merupakan mayoritas. Setiap kali dilangsungkan pemilihan umum, jumlah perempuan yang pada akhirnya duduk diparlemen hanya berkisar antara 8 sampai 12 %. Dan kecilnya jumlah perempuan di parlemen diyakini menjadi salah satu penyebab munculnya kebijakan-kebijakan negara yang merugikan perempuan.⁴

Penetapan kuota sebanyak minimal 30 % sebagaimana termaktub dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Pemilu: *Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.* pada awalnya menimbulkan pro dan kontra bahkan dikalangan pemerhati perempuan sendiri. Disatu sisi, kuota dianggap bisa menempatkan perempuan dalam posisi yang cukup kuat, karena dengan semakin banyaknya perempuan yang duduk diparlemen, maka akan semakin banyak kepentingan perempuan yang terakomodasi. Sementara di sisi lain, pihak yang kontra menyatakan bahwa akan riskan jika kuota ini hanya merupakan belas kasihan terhadap perempuan, karena tidak ada jaminan bahwa yang duduk diparlemen ini adalah perempuan yang peduli dan berpihak pada persoalan perempuan.

Gencarnya suara dari gerakan perempuan untuk mencapai angka kuota 30% ini pada akhirnya menjadi gema yang cukup keras dari kalangan politisi secara umum. Menjelang pemilu 2004 persoalan ini semakin sering digulirkan menjadi wacana publik. Ketika muncul menjadi wacana dikalangan yang lebih luas, orang-orang yang terlibat dan berusaha menunjukkan keberpihakan

⁴Alia Swastika, *Fenomena Perempuan Berpolitik: Sejarah dan persoalannya sekarang* (Kedaulatan Rakyat 14 Januari 2004), 11.

kepada perempuan menjadi lebih beragam pula. Para politisi, termasuk yang selama ini jauh dari isu-isu keperempuanan, kemudian mengangkat wacana ini di pelbagai debat publik dan artikel di media massa.

Tetapi mewujudkan keterwakilan perempuan dalam daftar caleg terus saja memunculkan kendala, Bukan hanya muncul beberapa kasus terlemparnya para perempuan dari nomor jadi yang kemudin diletakkan dalam *border line*. Mendekati batas akhir penyerahan susunan daftar calon legislative, media banyak memberitakan kesulitan partai politik untuk memenuhi atau menutup kuota perempuan 30% dilegislatif. Masalah ini terungkap dipelbagai media massa dan dari pelbagai daerah di seluruh Indonesia. Hampir semua partai politik – kecuali partai keadilan Sejahtera (PKS) — mengemukakan kurang dan sulitnya mendapatkan kader perempuan yang bisa diajukan sebagai calon legislatif. Bahkan partai besar seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI-Perjuangan) yang nota bene dipimpin seorang perempuan pun mengaku jika partainya kesulitan memenuhi kuota 30% tersebut.

D. Belenggu Kepemimpinan Politik Perempuan

Perjuangan perempuan tidak hanya akan berbenturan dengan belenggu negara tetapi juga nilai-nilai budaya yang masih digenggam kuat masyarakat. Budaya patriarkhi yang kemudian memunculkan hambatan-hambatan kodrati (ironisnya sebagian masyarakat juga salah mempersepsikannya dan menganggap bahwa mendidik anak, mengurus keluarga, memasak adalah kodrat perempuan) masih begitu kuat membelenggu dan mencengkeram pola pikir masyarakat sehingga memandang ranah politik adalah arena bermain laki-laki yang keras, kotor dan penuh intrik sehingga perempuan tidak pantas ada di dalamnya, kecuali sebagai pemanis dan penyegar suasana.

Konstruksi sosial kita yang membuat wanita tidak memungkinkan untuk berperan serta dalam politik. Peran laki-laki sangat dominan/sangat kuat sehingga walaupun ada perempuan yang muncul dalam karier politik, ini bukan karena suatu kehebatan wanitanya, tetapi merupakan kebaikan laki-laki, (istri yang akan berkiprah dalam politik harus mendapatkan ijin dari suami).

Pemberian “citra baku” oleh masyarakat, bahwa perempuan yang “baik” adalah perempuan yang dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai istri dan ibu dengan baik, dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berat sering kali tanpa adanya penggunaan hak dan wewenangnya. Perempuan harus menjadi makhluk yang menerima nasibnya sebagai konsekwensi dari pelaksanaan fungsi dan tugas kodratnya menjadi istri dan ibu, menerima benih anak, mengandung anak, melahirkan, menyusui, memelihara dan membesarkan anak, perempuan-perempuan harus banyak tinggal di rumah .

Masyarakat yang di semua bidang kehidupannya diatur oleh laki-laki lambat laun menggariskan peraturan bahwa perempuan sesuai dengan kodratnya harus tinggal di rumah, mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga dari pagi buta sampai malam. Dunianya adalah rumah tangga yang mengurus anak, masak, dapur dan sumur. Dan dunia laki-laki ada di masyarakat, ini merupakan salah satu bentuk konstruksi sosial yang sangat melemahkan posisi perempuan.

Di samping itu pendidikan politik yang dimiliki oleh perempuan masih terbatas, tidak ada demokratisasi dan pendidikan politik bagi perempuan. Sehingga meskipun ada perempuan yang menjadi tokoh partai politik, tetapi tidak ada program yang secara nyata menjunjung aspirasi perempuan. Keengganan perempuan terjun dalam dunia politik disebabkan juga oleh anggapan mereka bahwa politik itu kotor, penuh intrik dan tipu muslihat. Hal tersebut kemudian menyebabkan mereka lebih memilih menekuni bidang lain seperti bidang seni, ekonomi, pendidikan dan bidang-bidang lain yang dianggap lebih sesuai.

Sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Pratiwi sudarmono bahwa Termarginalisasinya perempuan dalam bidang politik menurutnya adalah disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

1. Kekuatan sosial politik yang ada selama ini masih kurang memberi kesempatan kepada perempuan untuk terjun dikancah politik, khususnya di bidang legeslatif dan eksekutif.
2. Sumberdaya manusia dalam hal ini perempuan, untuk bidang politik kurang mencukupi.
3. Anggapan bahwa politik itu kotor, penuh intrik dan tipu muslihat, menyebabkan perempuan enggan terjun kedalamnya.

Perempuan yang terjun dalam dunia politik selama ini juga hanya dalam bidang tertentu yang berada di bawah bidang pengawasan lain yang dimotori oleh laki-laki. Jadi kaum perempuan belum diterjunkan pada bidang politik yang strategis atau berkaitan dengan pengambilan keputusan yang menyangkut orang banyak. Dengan kata lain wanita belum memegang peranan penting dalam bidang politik.

Kenyataannya perempuan tidak pernah mendapatkan tempat yang pantas dalam setiap kegiatan, misalnya paling tinggi wakil ketua, bendahara , seksi dana, atau bahkan seksi konsumsi. Ini merupakan suatu refleksi dari suatu kenyataan dimana wanita selalu mendapatkan tempat yang tidak pas dan dilecehkan secara politik.

Dalam hal politik, perempuan merupakan alat mobilisasi kekuasaan/ alat politik yang sangat efektif : Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Wanita Karya, Wanita Kosgoro, Muslimat, Aisiyah dan lain-lain termasuk yang berada

dibawah orsospol tertentu selalu menjadi instrumen kekuasaan. Namun tidak ada imbalan yang pantas yang diberikan kepada mereka. Tidak ada program yang jelas, bagaimana untuk melindungi kaum perempuan. Masalah kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah perkosaan dan lain-lain. Tidak banyak di antara organisasi-organisasi sosial politik di Indonesia yang mengartikulasikan kepentingan perempuan, baik yang menyangkut isu non politik, sosial, dan politik. Karena konstruksi sosial tidak memungkinkan wanita untuk harus berbicara secara terbuka.⁵

E. Penutup

Perempuan harus berpartisipasi aktif di bidang politik sudah jelas. Peran serta tersebut masih harus dianalisa dalam hubungannya dengan “kebelumsiapan mereka di bidang pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku” untuk menghadapi lika-liku kehidupan politik. Yakinkan dan sadarkan setiap perempuan yang berhak memilih wakil-wakilnya dalam system pemerintahan untuk mengerti secara jelas apa arti suara mereka. Jangan jadikan mereka massa yang berbondong-bondong membeo dan menuruti saja apa yang di kehendaki penguasa.

Perempuan yang sudah memiliki kesiapan untuk tampil dapat memilih dengan penuh kesadaran wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam pemerintahan, dan juga dapat dipilih, perlu menggabungkan diri dalam satu loyalitas terhadap perjuangan perbaikan nasib perempuan. Partai-partai politik harus lebih banyak memberikan peran yang penting kepada perempuan. Perempuan yang sudah mampu harus berani mengeluarkan pendapatnya dengan cara yang ia yakini kebenarannya. Sekarang ini peraturan politik belum dapat memberikan peluang kepada perempuan untuk berbuat banyak. Hanya dengan menguasai dan memiliki bekal kepandaian, ketrampilan serta kepribadian yang kuat oleh setiap perempuan, perempuan akan diperhitungkan suaranya.⁶

Persepsi masyarakat tentang perempuan dan perannya, apalagi dalam ranah politik, hingga sekarang tampaknya masih simpang siur dan menimbulkan perdebatan yang cukup sengit. Bahkan di era reformasi dan globalisasi sekalipun, perempuan masih sering dicurigai dan dijadikan komoditas. Ada suatu gejala yang menarik di Indonesia yang apabila tidak dicermati kaum

⁵Afan Gaffar “Peran Wanita Dari Segi Politik” dalam *Potret Perempuan Tinjauan Politik Ekonomi Hukum di Zaman Orde Baru*, (Jogjakarta: PSW UMY dengan Pustaka pelajar, 2001), 7.

⁶Maftuchah Yusuf., *Perempuan Agama dan Pembangunan, Wacana Kritik Atas Peran dan Kepemimpinan Wanita* (Jogjakarta: Lembaga Studi dan Pendidikan (LSIP):2000), 127.

perempuan dalam masalah kepemimpinan nasional, munculnya pernyataan dari berbagai pihak bahwa tidak ada masalah bagi seorang perempuan menduduki jabatan legislatif, sebagai capres atau cawapres. Ternyata jika dicermati pernyataan tersebut mengandung tujuan politis dari orsospol tertentu, yaitu ingin memperoleh dukungan suara dari perempuan untuk orsospol tersebut. Apabila hal ini diteruskan maka citra kepemimpinan wanita di Indonesia akan pudar karena orang akan memperoleh kesan seolah-olah jika perempuan mencapai karir politik yang tinggi karena rekayasa. Padahal perlu diingat bahwa tujuan emansipasi, pertama adalah menginginkan perempuan muncul atas dasar kemampuan sendiri, yang di dalam masyarakat kecil hal ini sudah terwujud dan tidak menjadi masalah.⁷

Demi masa depan bangsa ini masalah kepemimpinan nasional dan regional harus terbuka, tidak membedakan seks (jenis kelamin) maupun ras, namun kepemimpinan di Indonesia hanya akan ditentukan oleh syarat-syarat seperti orang yang memimpin harus kapabel punya visi, jujur, dan memahami nilai-nilai universal

Daftar Pustaka

- Bruinissen, Martin van., *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, Yogyakarta : Bentang Budaya, 1998.
- Intosh, Donald Mc., *Weber and Freud on The Nature and Schaces of Authority*, American Sociological Review, 1969.
- Katjasungkana, Nursyahbani., dkk, *Potret Perempuan, tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Maftuchah Yusuf., *Perempuan, Agama dan Pembangunan, Wacana Kritik atas peran dan kepemimpinan Wanita*, Yogyakarta : Lembaga studi dan Inovasi Pendidikan (LSIP), 2002.
- Mansour Fakhil., *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- McChesney, Allen., *Memajukan dan Membela Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Yogyakarta, INSIST PRESS, 2003.
- Moedjiono, Imam., *Kepemimpinan dan Keorganisasian*, Yogyakarta : UII Press, 2002.

⁷Loekman Sutrisno, "Kepemimpinan Wanita Dari Perspektif Sosial Budaya" dalam *Potret Perempuan Tinjauan Politik Ekonomi Hukum di Zaman Orde Baru* (Jogjakarta: PSW UMY dengan Pustaka pelajar, 2001), 18.

- Saadawi, Nawal El., *Wajah telanjang Perempuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Soekanto, Soerjono., *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali, 1994
- Umar, Nasaruddin., *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur'an* , Jakarta : Para Madina, 1999.
- Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, *Hentikan Kekerasan Untuk Perempuan* Edisi :26, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan,2002.
- Jurnal *Profetika*, Vol.2, Surakarta : Program Magister Studi Islam UMS, 2000.